



GUBERNUR JAMBI

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /53 /KEP.GUB/SETDA.PBMD/2018**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG DAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, perlu dilakukan penunjukan kepada Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.4.1
1.5.2
3.6.1
3.9.1.1
3.10.1.
5-1.2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Pengguna Barang :

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi OPD yang dipimpinnya kepada Pengelola Barang Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur Jambi melalui Pengelola Barang Pemerintah Provinsi Jambi;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan

j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang Pemerintah Provinsi Jambi.

2. Kuasa Pengguna Barang :

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi Unit Kerja yang dipimpinannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinannya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5(lima) tahunan (Sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang Pemerintah Provinsi Jambi.

3. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang :

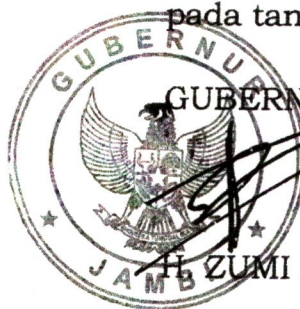
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemendahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan brang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah

- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KETIGA : Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 - 1 - 2018



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Tembusan :

- 1. Wakil Gubernur Jambi
- 2. Inspektur Provinsi Jambi.
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi .
- 4. Para Kepala OPD Provinsi Jambi
- 5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 153 /KEP.GUB/SETDA.PBMD/2018

TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG I
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA ORGANISASI PERANGI
DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR NAMA PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PADA SKPD DI LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018**

O	NAMA OPD	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
	2	3	4	5
	Sekretariat Daerah Provinsi Jambi	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	1. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi 2. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi 3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi 5. Kepala Biro Hukum Setda Prov.Jambi 6. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov.Jambi 7. Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi 8. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi	

			9. Kepala Biro Pengendalian Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi	Kasubbag Tata Usaha Biro Pengelolaan BMD Setda Provinsi Jambi
2	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	Sekretaris DPRD Provinsi Jambi.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
	Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	Inspektur Provinsi Jambi	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	Kasubbag Adm, Keuangan dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	1. Kepala UPTD (SMA TITIAN TERAS) 2. Kepala UPTD (SMK PPN JAMBI) 3. Kepala UPTD (BTIKP)	Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1. Kepala UPTD Akademi Analisis Kesehatan 2. Kepala UPTD Akademi Farmasi 3. Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan 4. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi		Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi		Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi
	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi		Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	1. Kepala UPTD TBJ 2. Kepala UPTD MPRJ 3. Kepala UPTD Museum Sigenjei	Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukan Provinsi Jambi	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukan Provinsi Jambi		Kasubag Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukan Provinsi Jambi
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala UPTD BPTPH 3. Kepala UPTD BPSPTPH 4. Kepala UPTD Perbenihan TPH 5. Kepala UPTD BPSDMP 6. Kepala UPTD BPTA & KJ 7. Kepala UPTD Pembibitan 8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan 9. Kepala UPTD Kebun Binatang	Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	1. Sekretaris Dinas 2. Kabid Pengem dan Penyuluh Perkebunan 3. Kabid Perbenihan dan Produksi Perkebunan 4. Kabid Pengolahan Standardisasi dan Pemasaran hasil Perkebunan 5. Kabid Prasarana Sarana dan Perlindungan dan Perkebunan	Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi		Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air 4. Kepala Bidang Bina Marga 5. Kepala Bidang Cipta Karya 6. Kepala Bidang Perumahan Rakyat 7. Kepala Bidang Bina Konstruksi & Pengendalian 8. Kepala UPTD Balai Pengujian	Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

9. Kepala UPTD Bina Peralatan dan Perbekalan

15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi		Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	1. Kepala UPTD BPSMB	Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Provinsi Jambi	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Provinsi Jambi		Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi		Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Kepala UPTD BPTT	Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
10	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	1. Kepala UPTD BBID 2. Kepala UPTD BBIS Kerinci 3. Kepala UPTD PPP Kuala Tungkal	Kasubbag Umum Aset dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi		Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi		Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
4 Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Kasubag Program Keuangan dan Aset Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Kasubag Keuangan dan Aset Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	Kasubag Keuangan dan aset
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	Sekretarias Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	1. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2. Kepala UPTD Kota Jambi 3. Kepala UPTD Kab. Batanghari 4. Kepala UPTD Kab. Muaro Jambi 5. Kepala UPTD Kab. Tanjab. Barat 6. Kepala UPTD Kab. Tanjab. Timur 7. Kepala UPTD Kab. Bungo 8. Kepala UPTD Kab. Tebo 9. Kepala UPTD Kab. Sarolangun 10. Kepala UPTD Kab. Merangin 11. Kepala UPTD Kab. Kerinci	Kasubbag Umum, Keuangan dan Aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi		Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi		Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi		Kasubbid Pengelolaan Aset dan Mess Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi	Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi.		Kepala Sub Bagian Keuangan Rumah Sakit Jiwa
Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi		Kabag Umum dan Humas Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi.



GUBERNUR JAMBI,

H. ZULFI ZOLA ZULKIFLI